



**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi dan Keuangan*

Oleh:

IRNA MARLINA SIREGAR

NIM: 17 402 00271

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Akuntansi & Keuangan*

Oleh:

IRNA MARLINA SIREGAR
NIM. 17 402 00271

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Nofinawati, M.A
NIP. 198211162011012003

PEMBIMBING II

H.Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Irna Marlina Siregar**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 10 Juni 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Irna Marlina Siregar** yang berjudul "**Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

PEMBIMBING II

H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irna Marlina Siregar
NIM : 17 402 00271
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 05 Oktober 2021
Yang menyatakan,



IRNA MARLINA SIREGAR
NIM. 17 402 00271

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Irna Marlina Siregar**
NIM : 17 402 00271
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 05 Oktober 2021

Saya yang Menyatakan,



IRNA MARLINA SIREGAR
NIM. 17 402 00271



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon 0634-22080 Faximile 0634-24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : IRNA MARLINA SIREGAR
NIM : 17 402 00271
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah
Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas
Utara

Ketua

Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Anggota

Nofinawati, M.A
NIP. 19821116 201101 2 003

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311 201503 1 005

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830510 201503 2 003

H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa/ 05 Oktober 2021
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/74 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,78
Predikat : PUJIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Tengku Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

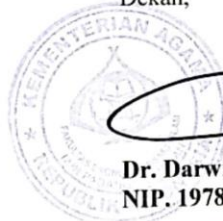
PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA**

NAMA : IRNA MARLINA SIREGAR
NIM : 17 402 00271

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, Oktober 2021
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si⁴
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA : Irna Marlina Siregar
NIM : 17 402 00271
JUDUL : Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara

Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun anggaran 2016 mendapatkan opini wajar dengan Pengecualian (WDP). Salah satu penyebabnya adalah kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang sudah berbasis akrual, dimana pencatatan akuntansi dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah mampu untuk penyajian laporan keuangan yang baik dan efektif sehingga pada tahun 2016 bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menyajikan laporan keuangannya pada tahun 2016 menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dan bagaimana peranan faktor pendukung dalam penyajian laporan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Teori dalam penelitian ini di dukung oleh hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 seharusnya Kabupaten Padang Lawas Utara mampu menyajikan laporan keuangan dengan tepat dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara tentang penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data sekunder berupa informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mengorganisasikan data, serta memilih mana yang penting dan dipelajari serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2016 dalam penyajian laporan keuangan daerah masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih berbasis kas dimana pencatatan akuntansi dilakukan jika terjadi penerimaan atau pengeluaran saat terjadinya transaksi.. Dalam keberhasilan penyajian laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Sumber Daya Manusia, Faktor Pendukung.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.”** Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Ibu Nurul Izzah, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M.Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Patuan Rahmat Syukur P Hasibuan, S.STP,MM yang telah menerima penulis untuk melaksanakan penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah serta seluruh Staff Pegawai BPKPAD Kabupaten Padang Lawas Utara.

7. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda Palitan Siregar dan Ibunda tercinta Tiamala Harahap, yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya serta perjuangan yang tiada mengenal lelah untuk pendidikan peneliti. Terimakasih doa dari kakak serta abang (Erma Yanti Siregar, Rosmiati Siregar, Toharruddin Siregar, Jurmiati Siregar) serta Kakak dan Abang Ipar, dan Semua Keponakan peneliti, (khususnya Chairil Kahfi Ramadhan Harahap) yang memberikan doa serta motivasi kepada peneliti.
8. Terimakasih juga kepada teman-teman keluarga besar AK-2 angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
9. Teruntuk sahabat peneliti, sahabat SMA, sahabat KKL, Sahabat Magang, serta teman-teman seperjuangan saya Kos Mutmainnah, terimakasih doa serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Untuk rekan-rekan peneliti, yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Terimakasih doa dan dukungannya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti

mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Oktober 2021

Peneliti,

IRNA MARLINA SIREGAR
NIM. 17 402 00271

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َ.اَ.ى..	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ِ.ى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...ُ.و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP	10
2. Perbandingan PP No. 25 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010	12
3. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Daerah ..	12
a. Sumber Daya Manusia	12
b. Perangkat Pendukung	14
4. Defenisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..	15
a. Defenisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	15
b. Pengguna Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah	16
5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
a. Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
b. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	16
6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ..	17
a. Relevan	19
b. Andal	19
c. Dapat Dibandingkan	20
d. Dapat Dipahami	20

7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	21
a. Basis Akuntansi	21
b. Prinsip Nilai Historis	22
c. Prinsip Realisasi	22
d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk	22
e. Prinsip Periodesitas	22
f. Prinsip Konsistensi	23
g. Prinsip Pengungkapan Lengkap	23
h. Prinsip Penyajian Wajar	23
8. Unsur-unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
a. Laporan Realisasi Anggaran.....	24
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	24
c. Neraca.....	25
d. Laporan Arus Kas.....	25
e. Laporan Operasional	25
f. Laporan Perubahan Ekuitas	26
g. Catatan atas Laporan Keuangan	26
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Subjek Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara ..	
1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara	33
2. Luas Wilayah dan Luas Geografis	33
3. Profile Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah	35
4. Susunan Kepengurusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah	38
5. Pembagian Tugas dan Wewenang.....	40
6. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah	46
B. Penyajian Laporan Keuangan Daerah	49
1. Laporan Realisasi Anggaran	49

2. Neraca.....	53
3. Laporan Arus Kas.....	54
4. Catatan atas Laporan Keuangan.....	56
C. Faktor Pendukung Penyajian Laporan Keuangan Daerah	61
D. Analisis Hasil Penelitian	63
1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara	63
a. Analisis Laporan Realisasi Anggaran	63
b. Analisis Laporan Neraca	65
c. Analisis Laporan Arus Kas	67
d. Analisis Catatan atas Laporan Keuangan.....	70
2. Analisis Faktor Pendukung Terhadap Keberhasilan Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP.....	71
E. Keterbatasan Penelitian.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tabel Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah/Kota Provinsi Sumatera Utara	4
Tabel 1.2	: Tabel Perbandingan PP No.25 tahun 2005 dan PP No. 71 tahun 2010	12
Tabel 1.3	: Penelitian Terdahulu	26
Tabel 1.4	: Tabel Luas Wilayah dan Rasio Total Menurut Kecamatan.....	34
Tabel 1.5	: Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.....	49
Tabel 1.6	: Tabel Neraca Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	52
Tabel 1.7	: Tabel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	54
Tabel 1.8	: Tabel Jumlah Pegawai di BPKPAD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Foto Perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah
- Lampiran 2 : Foto Bersama Bapak Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah
- Lampiran 3 : Foto Bersama Bapak Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah
- Lampiran 4 : Foto peneliti di Perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah zaman dimana teknologi semakin canggih, dibidang ilmu pengetahuan, dan berbagai alat transportasi serta mendorong kehidupan manusia menjadi tiada batas. Pengaruh era globalisasi tidak bisa dihindarkan bahkan masyarakat dunia. Negara Indonesia merupakan bagian wilayah dari dunia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Negara Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban untuk terus bisa dalam mengembangkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai yang diharapkan. Pemerintahan yang baik adalah merupakan suatu penyelenggaraan dalam mengatur pembangunan yang sesuai pada prinsip-prinsip demokrasi, pencegahan penggelapan dana investasi.

Dikatakan pemerintahan yang baik itu, bisa dilihat dari tiga komponen dasar yaitu transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas. Transparansi di dasari atas keterbukaan untuk memperoleh informasi serta juga kejujuran kepada masyarakat, karena masyarakat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi atas pertanggungjawaban dari pemerintah atas pengelolaan yang diharapkan. Partisipasi artinya keikutsertaan masyarakat untuk proses pengambilan keputusan melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan akuntabilitas yaitu tanggung jawab pengelolaan dari sumber daya yang tersedia.

Pada saat otonomi daerah diberlakukan harapannya yaitu pemerintahan daerah semakin bisa mandiri untuk menjalankan setiap aktivitas pemerintahan daerah yang diinginkan. Setujuan dengan prinsip dari otonomi daerah tersebut dilakukan pula prinsip otonomi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (nyata). Prinsip yang seperti itu merupakan suatu prinsip dimana prinsip itu harus menangani urusan pemerintah dilakukan berdasarkan tugas, tanggungjawab dan kewajiban yang sebenarnya telah tersedia dan memiliki potensi dan kekhasan daerah.¹

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, dibutuhkan juga memperhatikan hubungan atau keterkaitan pusat pemerintah dengan pemerintah daerah. Aspek hubungan tanggung jawab itu perlu memperhatikan kekhususan yang ada dan keragaman yang terdapat di daerah dalam system berbangsa dan bernegara. Aspek hubungan keuangan ini, pelayanan umum, pemanfaatan dari suatu sumber daya alam, sumber daya lainnya juga dilakukan secara adil. Di samping itu, perlu juga kita memperhatikan kesempatan dan tantangan masa depan dalam persaingan yang akan datang dengan pemanfaatan perkembangan ilmu yang semakin meningkat dari masa ke masa. Untuk bisa menjalankan peran yang telah ada, setiap daerah diamanhkan kewenangan yang luas disertai dengan pemberian

¹Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang), hlm. 3.

hak serta kewajiban untuk meningkatkan daerahnya dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan.²

Dengan demikian, disusunlah peraturan perundang-undangan yang bisa mengatur serta dapat mengelola penyusunan laporan keuangan dalam Peraturan Undang-Undang Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian, Undang-Undang ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik bisa menjadi jawaban penantian adanya suatu pedoman serta bisa dijadikan pijakan atau berpedoman dalam melaporkan keuangan serta bisa berterima umum yang sudah diamanahkan.

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dituntut juga bisa melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai. Namun, masih banyak mengalami hambatan atau kendala yang membuat penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah serta tidak berberjalan semulus yang diinginkan. Berdasarkan hasil audit BPK di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2016, kabupaten Padang Lawas Utara mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

²Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 115.

Tabel 1.1
Daftar Opini Laporan Keuangan
Pemerintah Kota/Kabupaten di
Provinsi Sumatera Utara

No	Entitas Pemerintah Daerah	2012	2013	2014	2015	2016
1	Prov. Sumatera Utara	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
2	Kab. Asahan	WDP	WDP	WTP DPP	WDP	WDP
3	Kab. Batubara	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
4	Kab. Dairi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Deli Serdang	TMP	TMP	WDP	TMP	WDP
6	Kab. Humbang Hasundutan	WTP DPP	WTP	WTP	WDP	WTP
7	Kab. Karo	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
8	Kab. Labuhanbatu	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
9	Kab. Labuhanbatu Selatan	WDP	WTP	WTP DPP	WTP	WTP
10	Kab. Labuhanbatu Utara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Langkat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kab. Mandailing Natal	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
13	Kab. Nias	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
14	Kab. Nias Barat	TMP	TMP	TMP	WDP	TMP
15	Kab. Nias Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	TMP
16	Kab. Nias Utara	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
17	Kab. Padang Lawas	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
18	Kab. Padang Lawas Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
19	Kab. Pakpak Barat	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
20	Kab. Samosir	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
21	Kab. Serdang Bedagai	WDP	WDP	WTP DPP	WDP	WDP
22	Kab. Simalungun	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP
23	Kab. Tapanuli Selatan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
24	Kab. Tapanuli Tengah	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
25	Kab. Tapanuli Utara	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
26	Kab. Toba Samosir	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
27	Kota Binjai	WDP	WDP	WTP DPP	WDP	WTP
28	Kota Gunungsitoli	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
29	Kota Medan	WTP	WTP	WTP DPP	WDP	WDP

		DPP	DPP			
30	Kota Padangsidempuan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
31	Kota Pematangsiantar	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
32	Kota Sibolga	WDP	WDP	WTP	TMP	TMP
33	Kota Tanjungbalai	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
34	Kota Tebing Tinggi	TMP	WDP	WTP	WDP	WTP ³

www.bpk.go.id/ihps

Keterangan:

- WDP : Wajar Dengan Pengecualian
- WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
- TMP : Tanpa Memberikan Pendapat
- WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Dalam hal itu, bisa dikatakan bahwa laporan keuangan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diyakini tingkat kewajarannya oleh auditor yang disebabkan dari beberapa faktor, antara lain: (1) terdapat kelemahan yang harus diperbaiki pada sistem pengendalian intern; (2) masih rendahnya ketertiban pencatatan dan penataan administrasi barang milik Negara atau daerah; (3) tidak sesuainya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku; (4) penyajian pelaporan keuangan bisa dikatakan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; (5) terjadi hal-hal kelemahan di sistem penyusunan laporannya; (6) kemampuan sumber daya manusia belum memadai pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus bertransformasi dan menggunakan strategi

³ www.bpk.go.id/ihps

perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan dengan langkah-langkah mengidentifikasi penyebab rendahnya kualitas penyusunan laporan keuangan, menempatkan personal yang kompeten, dan menyusun rencana perbaikan sebagai langkah peningkatan yang diinginkan.⁴

Penelitian ini berpijak pada karya terdahulu dari Silka Hartina “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat” yang menunjukkan pada tahun 2006 Kabupaten Langkat dalam penyajiannya sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sesuai tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Di pencapaian ini penyajian keuangannya didukung oleh faktor pendukung yang digunakan dalam hal keberhasilannya didukung oleh faktor SDM serta perangkat yang tersedia.

Dengan uraian yang tertera di atas, maka peneliti berkeinginan membuat penelitian dengan judul “ **Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara**”.

B. Batasan Masalah

1. Penyajiannya dibatasi pada lingkungan kabupaten yang akan diteliti.

⁴Fitri Yani Panggabean, “KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (1).pdf,” t.t., dalam *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, November 2019.

2. Penyaji membatasi bahasannya hanya pada penyajian laporan keuangan di tahun 2016.
3. Pembahasan masalah yang timbul hanya dibatasi pada penerapan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 di kabupaten yang diteliti.

C. Batasan Istilah

1. Analisis adalah kegiatan penyelidikan suatu peristiwa atau persoalan untuk diketahui keadaan yang sebenarnya terjadi.
2. Penyajian adalah suatu cara atau proses untuk menghasilkan sesuatu hal.
3. Laporan Keuangan yaitu catatan yang didalamnya berisi tentang informasi penjelasan keuangan perusahaan dalam waktu tertentu untuk dijadikan pengambilan keputusan.
4. Pemerintah Daerah merupakan serangkaian kegiatan urusan Pemerintahan dan Dewan Perwakilannya sesuai dengan Undang-Undang Otonomi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya yang diberlakukan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas tentang latar belakang, peneliti dapat merumuskan berbagai masalah, yaitu:

1. Apakah Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah menyajikan laporan keuangannya pada Tahun 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

2. Bagaimana peranan faktor pendukung pada keberhasilan dalam pencapaian penyajian laporan keuangannya pada Tahun 2016 sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan hal-hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Tahun 2016 pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara telah berpedoman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Untuk mengetahui peranan faktor pendukung pada pencapaian keberhasilan penyajian laporan keuangan Tahun 2016 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk peneliti, memberikan wawasan tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, dan juga meningkatkan keterampilan dalam karya ilmiah selanjutnya.
2. Untuk pemerintah daerah, dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan ide pada pihak pemerintahan yang terkait.
3. Untuk pihak lain, semoga bisa menjadi bahan referensi dan masukan bagi karya sejenis untuk selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi penelitian ini terarah dan memudahkan peneliti dalam menyusun setiap bagian skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II menurut tinjauan pustaka, terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

Bab III merupakan metodologi penelitian yang mengemukakan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis data, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari deskripsi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara yang berlaku, Pemerintah sudah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan ini memakai basis kas dalam pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual dalam pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana.⁵

Penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 bersifat sementara sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yang menerangkan bahwa selama pengakuan, pengukuran pendapatan serta belanja berbasis akrual belum dilakukan, diterapkannya pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Maka dari itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.⁶

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di terapkan pada lingkungan pemerintah daerah serta satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah pusat/daerah, dalam hal menurut peraturan perundang-undangan ini satuan organisasi diartikan wajib menyajikan laporan

⁵Anggota IKAPI, *Standar Akuntansi Pemerintahan* (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 7.

⁶Anggota IKAPI, hlm. 8.

keuangan. SAP Berbasis AkruaI tersebut diakui pada bentuk PSAP dan dilengkapi Kerangka KonseptuaI Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka KonseptuaI Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis AkruaI dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.⁷

Basis kas menuju akruaI adalah hasil kreativitas pada KSAP. Basis kas menuju akruaI ini secara umum ditetapkan sejak Tahun 2005 berdasarkan PP Nomor Tahun 2005 sampai pada Tahun 2014 sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010. Terminologi basis kas menuju akruaI ini dimunculkan pertama kali dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 pada pengantar PSAP dalam paragraf 11. Basis kas menuju akruaI dalam hal pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan menggunakan basis akuntansi kas, sedangkan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca menggunakan basis akuntansi akruaI.⁸

2. Perbandingan PP No. 25 Tahun 2004 dengan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 memiliki pola perubahan serta dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁷Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan* (Bogor: In Media, 2017), hlm. 14.

⁸Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI* (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), hlm. 19-20.

Tabel 1.2
Perbandingan PP No 24 Tahun 2005 dengan PP No 71 Tahun 2010

PP No 24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	PP No 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan	• Laporan Realisasi Anggaran (LRA) • Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL) • Neraca • Laporan Arus Kas • Laporan Operasional (LO) • Laporan Perubahan Ekuitas • Catatan Atas Laporan Keuangan

3. Faktor Pendukung dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Menurut Amstrong dalam buku karangan Kaswan dalam Buku Manajemen Sumber Daya Manusia di dasarkan menjadi empat prinsip, yaitu :. Pertama, Sumber Daya Manusia adalah asset paling penting yang mempunyai oleh sutau organisasi, sedangkan manajemen yang efektif merupakan kunci untuk keberhasilan perolehan suatu organisasi. Kedua, pencapaian kesuksesan ini mungkin dicapai apabila kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan manusia pada suatu organisasi saling berkaitan serta memberikan partisipasi terhadap pencapaian dari tujuan organisasi. Ketiga, budaya dan nilai, suasana organisasi dan perilaku manajerial yang datang dari budaya tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil perolehan yang terbaik. Keempat,

Manajemen Sumber Daya Manusia berhubungan pada integrasi, yang menjadikan semua anggota organisasi terlibat dan bekerjasama dalam hal mencapai tujuan yang diinginkan bersama.⁹

Sumber daya manusia yaitu pondasi utama dalam wilayah organisasi yang akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan organisasi. Kalau organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumber daya manusia adalah bagian terpenting dalam melaksanakan wewenang pemerintah dan pelayanan terhadap publik. Dengan demikian, sumber daya manusia adalah salah satu pondasi dalam menggapai tujuan organisasi pemerintah itu sendiri. Dalam situasi pemerintah bahwa sumber daya manusia akan tercemin dari personal atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada pemerintah tersebut baik pusat maupun daerah. Pegawai Negeri Sipil yang merupakan sumber daya manusia pemerintah sudah seharusnya mempunyai mutu yang kompeten dan professional.¹⁰

Dalam penyajian laporan keuangan diperlukan juga skill Sumber Daya Manusia atau pegawai untuk dapat melaksanakan satuan pendukung akan digunakan dan mempermudah pada penyusunan serta penyajian laporan keuangan yang terkait dengan adanya aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mempermudah dalam penyajiannya.

⁹Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing Organisasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 5.

¹⁰Rudianto Simamora dan Abdul Halim, "5158-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pengelolaan-aset-pasca-pemekaran-wilayah-dan-pen.pdf," t.t., dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 02, Januari 2013.

Seorang pegawai juga dituntut memahami dan mengerti dasar-dasar pengoperasian komputer dan mahir menggunakannya.

b. Perangkat Pendukung

Perangkat pendukung yang utama yang diperlukan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan merupakan perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis merupakan perangkat keras (*hardware*) berupa unit computer. Perangkat keras yaitu perlengkapan fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output adalah sebuah system informasi, sedangkan perangkat lunak (*software*) adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan berikutnya secara langsung menyiapkan laporan keuangan daerah ketika laporan tersebut dibutuhkan.¹¹

4. Defenisi dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Defenisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan merupakan arsip perusahaan yang melaporkan sebuah perusahaan pada istilah keuangan yang menyajikan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dengan pertanggungjawaban dan akuntabilitas.¹²

¹¹Hasan Basri, dkk. "95109-ID-analisis-laporan-keuangan-dikaitkan-deng.pdf," t.t., dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012, hlm. 123-138.

¹²Hengki Permadi, dkk. "24818-Article Text-75992-1-10-20190108 (1).pdf," t.t., dalam *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 8, No. 2, November 2016.

Laporan keuangan daerah merupakan kesimpulan dari proses pengidentifikasian, penilaian, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya.¹³

Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu alat bentuk dari tanggung jawab pemerintah pada masyarakat dan dasar dari pengambilan keputusan serta bentuk dari evaluasi kinerja suatu organisasi.¹⁴

Berdasarkan ulasan di atas, laporan keuangan daerah dapat diartikan suatu pelaporan akhir dari proses pengidentifikasian, pencatatan akhir dalam suatu periode dan merupakan alat bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

b. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut PP 71 Tahun 2010 pengguna Laporan Keuangan Pemerintah yaitu:¹⁵

- 1) Masyarakat
- 2) Wakil rakyat, lembaga Pengawas, dan lembaga pemeriksa

¹³Kurniawan M. Manangkalangi, “1622-ID-analisis penyajian laporan keuangan daerah provinsi sulawesi utara (1).pdf,” t.t., dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, September 2013, h. 22-31.

¹⁴Amelia Ika Putrid an Rike Lulut Dwi Ardilatri, “112420-ID-implementasi-standar-akuntansi-pemerinta.pdf,” t.t., dalam *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2014.

¹⁵Siswita Novia, dkk. “6159-12298-1-SM.pdf,” t.t., dalam *Jurnal WRA*, Vol. 3, No. 1, April 2015.

- 3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- 4) Pemerintah

5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah

a. Peranan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang bagus tentang keadaan keuangan dan seluruh transaksi. Laporan keuangan disajikan untuk melihat perbandingan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.¹⁶

Setiap entitas pelaporan memiliki peranan dalam melaporkan cara yang sudah dilaksanakan serta hasil proses yang dicapai secara terstruktur.

b. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah menyaediakan informasi yang bermanfaat untuk para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik meliputi :¹⁷

- 1) Menyajikan laporan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 2) Menyajikan laporan tentang kecukupan penerimaan periode berjalan pada membiayai seluruh pengeluaran.

¹⁶Anggota IKAPI, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, hlm. 21.

¹⁷Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*, hlm. 84.

- 3) Menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan pada aktivitas entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- 4) Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh aktivitas dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- 5) Menyediakan informasi tentang keadaan keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- 6) Menyediakan laporan mengenai perubahan kondisi keuangan entitas pelaporan.

Untuk memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi tentang sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, yang tersedia pada suatu entitas pelaporan.

6. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Konsep kualitas laporan keuangan dalam konsep Islam tercantum dalam Q.S Al-Hujurat : 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.¹⁸

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bogor: Halim, 2007), hlm. 83.

Laporan keuangan yang baik juga bisa dilihat dari opini yang diberikan oleh auditor. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat Tanpa Pengecualian yaitu laporan yang menyelesaikan proses audit sesuai dengan standar audit dan berterima umum. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas merupakan pendapat audit terhadap laporan keuangan yang keadaan atau kondisi tertentu masih memerlukan penjelasan. Tanpa Memberikan Pendapat yaitu laporan keuangan yang memiliki penyimpangan yang material dari prinsip akuntansi yang berterima umum¹⁹

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normal yang dibutuhkan dalam informasi akuntansi sehingga bisa terpenuhi tujuannya, yaitu:²⁰

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi di dalamnya bisa mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka menilai peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan. Informasi bisa dikatakan relevan apabila:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

¹⁹Sri Wiranti Setiyanti, "132672-ID-jenis-jenis-pendapat-auditor-opini-audit.pdf," t.t., dalam *Jurnal STIE SEMARANG*, Vol. 4, No. 2, hlm. 21-24.

²⁰Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Blu* (Jakarta: Indeks, 2009), hlm. 278-279.

- 3) Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan.
- 4) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bisa diandalkan atau bisa digunakan dalam berbagai hal, menyajikan setiap kebenaran secara jujur, serta bisa diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- 1) Penyajian jujur. Informasi yang didapatkan harus jujur dari setiap transaksi yang akan disajikan.
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenarannya sehingga tidak memperoleh kecurigaan.
- 3) Netralitas. Informasi ditujukan kepada keperluan umum dan tidak berpihak pada keperluan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang dimuat pada laporan keuangan akan lebih berguna apabila bisa diperbandingkan dengan laporan keuangan periode pada tahun sebelumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disediakan pada pelaporan keuangan harus bisa dipahami oleh para pengguna serta dibuktikan dalam bentuk serta istilah yang akan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah tiap kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan akan terwujudnya keadaan yang bagus untuk mewujudkan informasi dan laporan yang relevan. Tiga hal yang bisa menimbulkan kendala pada informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:²¹

- 1) Materialitas. Informasi dikatakan material jika kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan saat mencatat informasi tersebut bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang bisa dilihat atas dasar laporan keuangan.
- 2) Pertimbangan biaya dan mafaat. Manfaat yang telah dihasilkan dari informasi seharusnya bisa melebihi biaya penyusunannya. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak seharusnya menyediakan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunan.
- 3) Keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik dibutuhkan dalam hal pencapaian keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan yang diharapkan.

7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan ditujukaan untuk kebijakan yang bisa dimengerti dan patuhi para pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, serta para pengguna laporan keuangan bisa dipahami

²¹Anggota IKAPI, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, hlm. 30.

laporan keuangan yang disediakan. Beberapa hal yang menjadi prinsip yang digunakan pada saat menyusun laporan keuangan, yaitu :²²

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi diterapkan pada pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual dalam hal pengakuan pendapatan Laporan Operasional, beban, asset, kewajiban, dan ekuitas.

Dalam hal anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, bisa dikatakan pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Basis akrual pada Neraca akun asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat transaksi berlangsung, tanpa diperhatikannya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip nilai historis

Asset dicatat sebesar pada pengeluaran kas dan setara kas sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk diperolehnya asset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diinginkan dan akan dibayarkan untuk terpenuhinya kewajiban di masa mendatang dalam melaksanakan aktivitas pemerintah.

²²Anggota IKAPI, hlm. 27-30.

c. Prinsip realisasi

Dalam hal pemerintahan, pendapatan basis kas yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan dibuat untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) pada akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan pada akuntansi komersial.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk

Informasi dimaksudkan disini adalah menyediakan dengan sewajarnya kegiatan transaksi serta kegiatan yang lainnya harus disajikan. Jika substansi kegiatan transaksi lain tidak memiliki konsisten, maka itu harus diungkapkan secara jelas dalam Catatan Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas bisa diukur dan keadaan sumber daya yang ada bisa ditetapkan. Periode utama yang diterapkan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama digunakan di kejadian yang sama dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan maupun entitas

akuntansi (prinsip konsistensi internal). Pengaruh atas perubahan penerapan cara ini dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyediakan secara lengkap mengenai informasi yang diperlukan oleh pengguna. Informasi yang diperlukan para pengguna laporan keuangan bisa diposisikan pada lembar awal (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan menyediakan secara wajar mengenai laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam hal penyajian wajar, hal yang dipertimbangkan dikatakan sehat bagi penyajian laporan keuangan ketika melewati ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan asset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

8. Unsur-Unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ada beberapa unsur serta bentuk penyajian keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu:²³

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan penjelasan mengenai keuangan yang berguna dalam memperkirakan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai setiap aktivitas pemerintahan daerah pada waktu yang akan datang dengan cara menyediakan laporan secara membandingkan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan penjelasan informasi bagi para pengguna tentang petunjuk perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi :

- 1) Telah dijalankan secara efisien, efektif, dan hemat.
- 2) Telah dilakukan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
- 3) Telah dikerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yaitu laporan yang menyediakan informasi penjabaran mengenai kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih pada tahun berjalan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) /SiKPA (Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran), koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

²³Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*, hlm. 228-250.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PSAP 01 PP Nomor 71 Tahun 2010). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan yang menyediakan informasi penjelasan tentang sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi arus kas berguna sebagai penunjuk jumlah arus kas pada masa yang akan datang serta digunakan untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi tentang keseluruhan aktivitas operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin pada pendapatan-Laporan Operasional, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas laporan yang menyediakan penjelasan tentang perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi terperinci dari penjelasan dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Neraca.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil karya ilmiah sebelumnya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini. Beberapa karya ilmiah sebelumnya yang berhubungan dengan penyajian keuangan daerah, antara lain:

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Silka Hartina (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2009).	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.	Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2006 pada penyajian laporan keuangan daerah sudah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam pencapaian Keberhasilan penyajian ini tidak terlepas dari faktor pendukung yaitu sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya. ²⁴

²⁴Silka Hartina, "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat" (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2009).

2	Ihwan Kema (Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, 2013).	Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado.	Hasil dari karya ilmiah ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Manado pada tahun 2011 dalam penyusunan belum berpedoman pada SAP, bisa dilihat di pos bagi hasil pada provinsi/kab./kota dan pemerintah desa. Kabupaten manado telah berpijak pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Kauangan. ²⁵
3	Ardy Wilther Sangian (Jurnal, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, 2015).	Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAP (PP NO. 24 TAHUN 2005) Atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Menunjukkan secara Keseluruhan Pemerintah Sulawesi Utara sudah berpijak pada SAP dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, kecuali dalam pos belanja bantuan keuangan sebaiknya tidak dimasukkan di Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP (PP No. 24 Tahun 2005). ²⁶

Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian terdahulu dengan ini adalah sama-sama dalam meneliti tentang Laporan Keuangan Daerah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, dan

²⁵Ihwan Kema, "1696-ID-penyajian-laporan-keuangan-daerah-berdasarkan-standar-akuntansi-pemerintahan-pad.pdf," t.t., dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3 September 2013, hlm. 771-781.

²⁶Ardy Wilther Sangian, "2836-ID-analisis-penerapan-akuntansi-berdasarkan-psap-pp-no24-tahun-2005-atas-penyusunan (1).pdf," t.t., dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4, Desember 2015, hlm. 413-421.

hasil penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian di Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama dalam meneliti tentang Laporan Keuangan Daerah.. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, jenis penelitian. Penelitian terdahulu adalah lokasi penelitian di Kota Manado. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama dalam meneliti tentang Laporan Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian. Penelitian terdahulu adalah lokasi di Kota Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berlokasi di Jalan Lintas Gunung Tua – Padangsidempuan Km. 4, Sigama, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari bulan September 2020 sampai dengan Juni 2021.

B. Jenis Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis memakai penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Karya ilmiah ini melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi dan menganalisisnya. Metode deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam penyajian laporan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Staff di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang berjumlah 117 orang.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:²⁷

²⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian. Data primer dilakukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Data primer bisa berupa pendapat subjek, hasil pengamatan suatu kejadian, dan hasil pengujian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat umum. Data sekunder dapat didapatkan dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan pada karya ilmiah ini penulis memakai instrument atau alat pengumpulan data sebagai berikut:²⁸

- a. Teknik wawancara, Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu dengan mempersiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditulis berupa pertanyaan fakta, data, pendapat, persepsi yang berkenaan dengan masalah yang dikaji.
- b. Teknik observasi, yaitu pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian. Pengumpulan data diperoleh ketika peristiwa. Instrument yang dipakai dapat berupa lembar observasi, panduan pengamatan maupun alat perekam.
- c. Studi Dokumentasi, merupakan sumber data yang diperoleh untuk melengkapi hasil karya yang diteliti berupa gambar, video ataupun sumber tertulis lainnya.

²⁸ Wahyu Purhantara, hlm. 80-87.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal dilaksanakan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:³⁰

a. Perpanjangan pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diperoleh selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Dengan demikian, peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang didapatkan dari sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak.

b. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Peneliti bisa meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi dari berbagai buku-buku, hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), 427.

³⁰ Sugiyono, hlm. 461-462.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi disini seperti data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Dalam laporan penelitian ini ada baiknya data-data yang diperoleh perlu dilengkapi dengan foto-foto, agar menjadi lebih dipercaya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara

Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas Utara terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dengan ibukotanya Gunung Tua. Seperti daerah-daerah lainnya yang berdaerah di wilayah Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan daerah yang beriklim tropis dan memiliki topografi yang berbukit. Kawasan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah penghubung antara wilayah pantai timur yang sudah berkembang dan merupakan pintu perdagangan nasional dan regional dengan wilayah pantai barat yang kaya akan sumber daya alam dan relative belum maju. Posisi tersebut menawarkan keuntungan dan peluang ekonomi bagi Kabupaten Padang Lawas Utara.³¹

2. Luas Wilayah dan Luas Geografis

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2007, wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi 12 kecamatan yaitu: Kecamatan Batang

³¹<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id › dokumen> (diakses pada 25 mei 2021)

Onang, Kecamatan Dolok, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Hulu Sihapas, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Portibi, Kecamatan Simangambat, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Halongonan Timur, dan Kecamatan Padang Bolak Tenggara serta memiliki 386 desa dan 2 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan SK Menhut No. 44/MENHUT-II/2005 adalah 3.918,05 km² dengan penyebaran pada masing-masing kecamatan seperti pada tabel.

Tabel 1.4
Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Di Padang Lawas Utara

No	Kecamatan di Padang Lawas Utara	Luas Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara menurut Kecamatan (km ²)	
		2019	2020
1	Batang Onang	485,00	485,00
2	Padang Bolak Julu	196,44	196,44
3	Portibi	246,13	246,13
4	Padang Bolak	699,06	699,06
5	Padang Bolak Tenggara	94,93	94,93
6	Simangambat	429,42	429,42
7	Ujung Batu	269,62	269,62
8	Halongonan	410,27	410,27
9	Halongonan Timur	181,33	181,33
10	Dolok	525,27	525,27
11	Dolok Sigompulon	262,56	262,56
12	Hulu Sihapas	39,05	39,05

Total	3.918,05	3.918,05 ³²
-------	----------	------------------------

Sumber: "DOCRPIJM_1492568851Bab_2_rev00.pdf," t.t.

Secara geografis Padang Lawas Utara terletak pada 1° 13' 50" - 2° 2' 32" Lintang Utara dan 99° 20' 44" - 100° 19' 10" Bujur Timur, dengan batas-batas administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Bilah Hulu, Kecamatan Sungai Kanan, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu;
- b) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Huristak, Kecamatan Barumon Tengah, Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas; dan
- d) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Padangsidempuan Timur, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Arse, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.³³

³² "DOCRPIJM_1492568851Bab_2_rev00.pdf," t.t.

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_La... (diakse pada 27 mei 2021)

3. Profil Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terhitung per 1 Januari 2017. Pertanggungjawaban suatu Satuan Kerja Instansi Pemerintah kepada public pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan Daerah melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau janji dari penyelenggara pelayan untuk memberikan pelayanan yang prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolak ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah memiliki Standar

Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan dibidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset.³⁴

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan asset daerah;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah, kecuali pelaksanaan kecuali pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan pengendalian benda-benda berharga pajak daerah;
- d. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- e. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah;
- f. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

³⁴ <https://bpkpad.padanglawasutarakab.go.id/>

- g. Pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah atau bangunan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pengelolaan pemanfaatan Gedung Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- i. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan asset daerah;
- j. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan asset daerah;
- k. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah atau bangunan.³⁵

4. Susunan Kepengurusan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa urusan pemerintah wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara:

- a. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Asset Daerah, terdiri dari :

³⁵<https://bpkpad.padanglawasutara.go.id/read/23/struktur-opd-bpkpad-padang-lawas-utara>

- 1) Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
 - 2) Sub Bidang Penetapan.
 - 3) Sub Bidang Pengendalian Operasional Pendapatan.
- d. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB.
 - 2) Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB.
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
- e. Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung.
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung.
 - 3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Pembiayaan.
- f. Bidang Aset, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah.
 - 3) Sub Bidang Penghapusan Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Verifikasi.

- 2) Sub Bidang Pencairan Dana.
- 3) Sub Bidang Pembukuan.
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Data.
 - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
 - 3) Sub Bidang Pembinaan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT).³⁶

5. Pembagian Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari :

a. Kepala BPKPAD

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan azas perbantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Melaksanakan fungsi BUD;

³⁶<https://bpkpad.padanglawasutara.go.id/read/23/struktur-opd-bpkpad-padang-lawas-utara>

- 3) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 4) Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 5) Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- 6) Mengkoordinir penyusunan proyeksi keuangan daerah untuk APBD;
- 7) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah.³⁷

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala BPKPAD dalam melaksanakan pelayanan penunjang teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, yang meliputi urusan umum, urusan keuangan serta urusan program. Adapun beberapa tugas yang dimaksud adalah :

- 1) Menyusun langkah kegiatan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi;
- 2) Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya;

³⁷ <https://bpkpad.padanglawasutara.go.id/kewajiban-wewenang>

- 3) Mengkoordinasikan para Kepala Subbagian dilingkungan Sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- 4) Mengkoordinir penholahan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan, administrasi, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan perlengkapan kantor;
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta kesejahteraan pegawai;
- 6) Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan;
- 7) Mengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan program kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
- 8) Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- 9) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan manyangkut bidang pelayanan administrasi pada satuan

organisasi dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;

- 10) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.³⁸

c. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah dibidang Pengelolaan Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- 2) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas;
- 3) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- 4) Pengelolaan utang dan piutang daerah;

³⁸ <https://bpkpad.padanglawasutara.go.id/kewajiban-wewenang>

- 5) Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- 6) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- 7) Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Badan Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- 8) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
- 9) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.³⁹

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Pajak dan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Akuntansi dan Pelaporan. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

³⁹ <https://bpkpad.padanglawasutara.go.id/kewajiban-wewenang>

- 1) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- 2) Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD;
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

e. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dibidang Anggaran. Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- 3) Pengendalian penyusunan anggaran;
- 4) Menilai prestasi kerja bawahan di Bidang Anggaran berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

- 5) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang Anggaran;
- 6) Pengevaluasian dan penyusunan laporan pelaksanaan dibidang Anggaran;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

f. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana sebagian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Padang Lawas Utara di Bidang Aset. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas:

- 1) Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 2) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- 3) Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- 4) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- 5) Menilai prestasi kerja bawahan dibidang Aset berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir;

6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dibidang Aset;

7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.⁴⁰

6. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah (BPKPAD)

Sebagai unit dibawah Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Padang Lawas Utara. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Dalam rangka menunjang dan membantu Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menyusun visinya yang menunjukkan jati diri dan fungsinya sebagai unit perangkat daerah di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pengelolaan Asset Daerah dan merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi dibawah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah yang Wajar dan Transparan” kata kunci dari visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tiada lain adalah Bagaimana agar Profesionalisme didalam mengelola Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

⁴⁰ <https://bpkpad.padanglawasutara.go.id/kewajiban-wewenang>

Daerah dapat terwujud. Artinya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah harus dikelola oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional sesuai dengan Bidangnya yang diharapkan dapat menyokong Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan.

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai bentuk nyata dari visi tersebut. Maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh pernyataan misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memperhatikan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Misi

Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pelayanan umum pemerintahan;
- 2) Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur;
- 3) Peningkatan tata kelola pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah; dan

- 4) Sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah yang transparan. Pemenuhan kebutuhan public ini dijadikan misi yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.⁴¹

B. Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 1.5
PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN
2015
(Dalam Rupiah)

AUDITED				
NO	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	REALISASI 2015
4	PENDAPATAN- LRA	1.002.290.180.81 1	1.049.569.061,26	733.242.018.371, 84
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	33.884.459.003	30.453.223.133,2 6	26.446.077.260,8 4
4.1.1	Pendapatan Pajak daerah-	6.562.427.884	6.503.992.499,00	4.693.774.307,00

⁴¹Wawancara dengan Ahmad Syaifuddin Siregar, tanggal 24 Mei 2021 di Kantor BPKPAD Padang Lawas Utara.

	LRA			
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	3.083.139.353	2.764.715.957,00	5.566.728.436,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	0,00	475.167.290,00	479.588.562,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	24.238.891.766	20.709.347.387,2 6	15.705.985.955,8 4
4.2	PENDAPATAN TRANSFER- LRA	742.844.164.808	794.693.624.975, 00	606.434.178.111, 00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LRA	690.359.716.057	736.693.624.975, 00	504.651.158.603, 00
4.2.1. 1	Bagi Hasil Pajak-LRA	26.807.129.711	39.501.474.961,0 0	12.509.311.390,0 0
4.2.1. 2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam- LRA	2.189.592.000	2.153.079.264,00	1.679.015.213,00
4.2.1. 3	Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA	481.455.045.996	542.199.556.000, 00	444.806.362.000, 00
4.2.1. 4	Dana Alokasi Khusus (DAK)- LRA	179.907.948.350	152.839.514.750, 00	45.656.470.000,0 0
4.2.2	Pendapatan Transer	0,00	0,00	55.146.685.000,0 0

	Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA			
4.2.2.3	Dana Penyesuaian-LRA	0,00	0,00	55.146.685.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah daerah Lainnya-LRA	44.630.326.751	49.721.942.571,00	28.028.200.508,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA	44.630.326.751	49.721.942.571,00	28.028.200.508,00
4.2.4	Bantuan Keuangan-LRA	7.854.122.000	7.854.122.000,00	18.608.134.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LRA	7.854.122.000	7.854.122.000,00	18.608.134.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA	225.561.557.000	224.846.148.346,00	100.361.763.000,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya-LRA	225.561.557.000	224.846.148.346,00	100.361.763.000,00
5	BELANJA	822.849.542.449,65	761.974.221.809,00	606.557.660.091,00
5.1	BELANJA OPERASI	563.045.221.001,65	533.533.794,118,00	435.212.184.149,00
5.1.1	Belanja Pegawai	311.652.956.276,65	299.295.334.530,00	280.257.458.404,00
5.1.2	Belanja Barang	238.076.122.725,	221.701.383.203,	148.566.178.711,

	dan Jasa	00	00	00
5.1.5	Belanja Hibah	11.492.000.000,0 0	11.350.614.629,0 0	3.554.761.089,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.824.142.000,00	1.186.461.629,00	2.833.785.945,00
5.2	BELANJA MODAL	258.304.321.448, 00	228.440.427.691, 00	170.639.985.692, 00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	8.000.000.000,00	7.652.800.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.686.901.590,0 0	19.071.920.750,0 0	25.134.935.931,0 0
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.337.726.258,0 0	37.851.795.400,0 0	55.191.508.510,0 0
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.072.193.600, 00	163.665.207.541, 00	89.882.243.251,0 0
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	207.500.000,00	198.704.000,00	431.298.000,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	0,00	705.490.250,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	0,00	705.490.250,00
6	TRANSFER	278.563.061.479, 00	276.538.065.044, 00	94.167.288.994,0 0
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.215.749.160,00	936.990.488,00	0,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.215.749.160,00	936.990.488,00	0,00

	Daerah			
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	276.347.312.319, 00	275.601.075.456, 00	94.167.288.994,0 0
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	275.555.220.555, 00	274.874.733.070, 00	93.441.099.661,0 0
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	792.091.764,00	726.342.386,00	726.189.333,00
	SURPLUS/(DEFIS IT)	(99.122.423.117,6 5)	11.056.773.272,2 6	32.517.069.286,8 4
7	PEMBIAYAAN			
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	102.035.763.387, 65	102.035.763.887, 65	69.857.925.249,8 1
7.1.1	Penggunaan SiLPA	102.035.763.387, 65	102.035.763.887, 65	69.857.925.249,8 1
7.2	PENGELUARA AN PEMBIAYAAN	2.913.340.270,00	2.405.249.525,00	339.231.149,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	339.231.149,00
7.2.8	Pengembalian Sisa Dana Transfer	463.340.270,00	0,00	0,00
7.2.9	Pembayaraan	450.000.000,00	405.249.525,00	0,00

	Utang Jangka Pendek Lainnya			
	PEMBIAYAAN NETTO	99.122.423.117,6 5	99.630.514.362,6 5	69.518.694.100,8 1
	(SILPA)	0,00	110.687.287.634,91	102.035.763.387,65

Sumber: Data diolah dari Laporan Realisasi Anggaran Padang Lawas Utara

2. Neraca

Tabel 1.6
NERACA
PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Per 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah)
AUDITED

URAIAN	2016	2015
ASET		
ASET LANCAR	110.681.856.020,91	102.018.262.816,65
Kas di Kas Daerah	7.346.741,00	7.371.741,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	634.611.924,80	5.966.742,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	13.373.086.755,31	45.392.104.760,27
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(7.645.127.061,96)	(8.109.238.195,49)
Beban Dibayar Dimuka	75.704.166,67	313.208.333,34
Persediaan	3.965.309.524,07	3.176.296.992,92
JUMLAH ASET LANCAR	121.092.788.070,80	142.814.102.020,69
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek	0,00	0,00

Pembangunan		
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Lainnya		
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.093.061.656,00	1.093.061.656,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	3.093.061.656,00	1.093.061.656,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	3.093.061.656,00	1.093.061.656,00
ASET TETAP		
Tanah	51.737.154.163,00	44.044.658.163,00
Peralatan dan Mesin	201.267.714.486,00	188.655.111.413,00
Gedung dan Bangunan	719.484.062.886,00	667.568.434.136,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.042.940.362.902,73	810.662.573.536,73
Asset Tetap Lainnya	26.146.635.718,00	23.457.998.023,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.159.201.373,00	34.003.573.598,00
Akumulasi Penyusutan	(1.019.769.667.678,00)	(852.487.292.874,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.046.965.463.850,73	915.905.055.995,73
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Asset Tidak Berwujud	1.355.772.200,00	656.126.700,00
Asset Lain-lain	9.243.845.558,00	9.176.685.296,00
JUMLAH ASET LAINNYA	10.599.617.758,00	9.832.811.996,00
JUMLAH ASET	1.181.750.931.335,53	1.069.645.031.668,42
KEWAJIBAN		

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.915.127,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	25.263.973.568,00	16.565.143.618,00
Utang Pemotongan Pajak Pusat	403.077.887,00	408.306.879,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.668.966.582,00	16.973.450.497,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	25.668.966.582,00	16.973.450.497,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.156.081.964.753,53	1,052.671.581.171,42
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.181.750.931.335,53	1.069.645.031.668,42

Sumber: Data diolah dari Laporan Neraca Padang Lawas Utara

3. Laporan Arus Kas

Tabel 1.7
PEMERINTAHAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Rupiah)
Audited

URAIAN	2016	2015
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	6.503.992.499,00	4.693.774.307,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	2.764.715.957,00	5.566.728.436,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	475.167.290,00	479.588.562,00
Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	20.692.347.387,26	15.705.985.955,84
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	736.693.624.975,00	504.651.158.603,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-Lra	0,00	55.146.685.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya-LRA	49.721.942.571,00	28.028.200.508,00
Bantuan Keuangan-LRA	7.854.122.000,00	18.608.134.000,00
Pendapatan Lainnya-LRA	224.846.148.346,00	100.361.763.000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	1.049.552.061.025,26	733.242.018.371,84
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	299.295.334.530,00	280.257.458.404,00
Belanja Barang dan Jasa	221.701.383.203,00	148.566.178.711,00
Belanja Hibah	11.350.614.756,00	3.554.761.089,00
Belanja Bantuan Sosial	1.186.461.756,00	2.833.785.945,00
Belanja Tak Terduga	0,00	705.490.250,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	936.990.488,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	274.874.733.070,00	93.441.099.661,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	726.342.386,00	726.189.333,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Pendek Lainnya	405.249.525,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	810.477.109.587,00	530.084.963.393,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	239.074.951.438,26	203.157.054.978,84

Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin-LRA	17.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	17.000.000,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Tanah	7.652.800.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.071.920.750,00	25.134.935.931,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.851.795.400,00	55.191.508.510,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.665.207.541,00	89.882.243.251,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	198.704.000,00	431.298.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	230.440.427.691,00	170.639.985.692,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(230.423.427.691,00)	(170.639.985.692,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	339.231.149,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	0,00	339.231.149,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(339.231.149,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Koreksi SiLPA	500,00	0,00

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	65.491.862.053,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	65.491.862.553,00	0,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	65.489.209.176,00	0,00
<i>Jumlah Arus kas Keluar</i>	65.489.209.176,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	2.653.377,00	0,00
Kenaikan / (Penurunan) Kas	8.654.177.124,26	32.177.838.137,84
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	102.035.763.387,65	69.857.925.249,81
Saldo Akhir di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	110.689.940.511,91	102.035.763.387,65
Kas di BULD	0,00	0,00
Kas Lainnya	634.611.924,80	5.966.742,00
Setara Kas	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	111.324.552.436,71	102.041.730.129,65

Sumber: Data diolah dari Laporan Arus Kas Padang Lawas Utara

4. Catatan atas Laporan Keuangan

a. Latar Belakang Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja oleh pemerintah daerah dalam satu periode.

Dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

diharapkan Pemerintah Daerah bisa mewujudkan pemerintah yang baik. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan sosial masyarakat sehingga pemerintah dapat menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat sebagai wujud dari akuntabilitas dan transparansi.

Tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Daerah adalah memberikan gambaran serta informasi keuangan kepada masyarakat, serta dimaksudkan juga untuk dapat digunakan sebagai berikut :

1) Akuntabilitas

Pemerintah Daerah harus mampu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan telah di percayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik melalui laporan keuangan secara periodik.

2) Manajerial

Memberikan serta menyediakan informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dimasa yang akan datang dan pengelolaan keuangan pemerintah serta dapat memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan ekuitas dana.

3) Tranparansi

Informasi laporan keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan.

b. Kebijakan Akuntansi

1) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun anggaran 2016 disusun dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAP) yaitu masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

2) Masa pembukuan merupakan salah satu anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

3) Mata uang yang digunakan adalah Rupiah, Valuta Asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah, dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4) Basis akuntansi

Basis akuntansi, yang dipergunakan dalam laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara adalah :

a) Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan

b) Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas

5) Pendapatan

a) Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang menambah ekuitas dana dalam periode Laporan Keuangan yang merupakan hak

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, yang tidak perlu dibayar oleh pemerintah daerah.

- b) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c) Pembukuan pendapatan dilakukan menggunakan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto atas pendapatan.

6) Belanja

- a) Belanja adalah seluruh pengeluaran kas Kabupaten Padang Lawas Utara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode laporan keuangan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas Kabupaten Padang Lawas Utara.
- c) Belanja dalam laporan keuangan diklasifikasikan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga.

7) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja, sedangkan deficit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja.

8) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali untuk menutupi deficit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- 9) Sisa Lebih/kurang Perhitungan Anggaran adalah akumulasi surplus/deficit dengan pembiayaan netto.
- 10) Asset adalah seluruh harta yang diakui di dalam neraca pada saat diterima hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.
- 11) Persediaan
- a) Persediaan adalah barang yang dipakai habis yang diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - b) Persediaan dicatat pada akhir tahun buku.
- 12) Investasi permanen
- a) Investasi permanen dinilai atas harga perolehan yang termasuk didalamnya biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk perolehan investasi permanen.
 - b) Harga perolehan dalam Valuta Asing dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar pada saat tanggal transaksi.
- 13) Asset tetap
- a) Asset tetap dalam pengerjaan dinilai di dalam sebesar realisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut.
 - b) Nilai asset tetap bertambah apabila terjadi penambahan dan pengurangan nilainya apabila terjadi penghilangan yang telah ditetapkan oleh Bupati Padang Lawas Utara.

- c) Nilai asset tetap Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara tidak disusutkan.
- d) Nilai asset tetap dalam neraca Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara tidak termasuk asset tetap yang dipisahkan (asset tetap BUMN/BUMD dan perusahaan lainnya).

14) Asset Lainnya

- a) Tagihan penjualan angsuran dan piutang lain-lain dinilai sebesar nilai nominal.
- b) Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun.
- c) Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum didalam APBD.

15) Kewajiban

- a) Utang adalah kewajiban pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu.
- b) Utang dikelompokkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang.
- c) Kewajiban diakui pada saat kewajiban terjadi.
- d) Kewajiban dibukukan dalam neraca sebesar nilai nominal dari kewajibann tersebut.

- e) Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.

C. Peranan Pendukung Dalam Penyajian Keuangan Daerah

Perangkat pendukung dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri atas sumber daya manusia (pegawai) yang bekerja menyajikan laporan keuangan daerah serta perangkat pendukung yang akan digunakan sehingga dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mengoperasikan perangkat pendukung berupa computer dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dibutuhkan sejumlah pegawai dengan skill khusus yang dapat mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Jumlah pegawai yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 117 orang, 30 orang diantaranya merupakan pegawai negeri sipil dan 87 orang masih menjabat sebagai karyawan honor.

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai di BPKPAD
Padang Lawas Utara

Pegawai Negeri Sipil				
No	Pegawai Negeri Sipil		Honor	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	17	13	34	53
Total = 30			Total = 87	
Jumlah Keseluruhan = 117				

Sumber: hasil wawancara dengan bapak sekretaris BPKPAD PALUTA

Dari pegawai yang ada tidak lebih dari 50% pegawai tersebut yang paham dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Salah satu penyebabnya adalah setiap pegawai yang telah mengikuti pelatihan tidak menjamin bahwa mereka telah paham dan mengerti dalam mengoperasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan mampu membaca laporan keuangan. Selain itu, faktor keinginan untuk menguasai dalam mengoperasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah masih sangat kurang. Oleh karena itu, dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara masih menggunakan bantuan tenaga konsultan dan melakukan pendamping dari BPK.

Dari 117 orang pegawai yang terdapat pada bagian keuangan, hanya 10 orang yang mahir dalam menjalankan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Selebihnya masih belum menguasai program aplikasi tersebut dan masih memerlukan pengawasan dan arahan lebih lanjut dalam mengoperasikan program aplikasi tersebut dalam penyajian laporan keuangan yang baik. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tepat waktu.

Perangkat pendukung yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis yaitu perangkat keras (*hardware*) berupa unit computer. Selain itu juga perangkat (*software*) yang digunakan adalah aplikasi khusus yang dinamakan program Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu suatu aplikasi yang

digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan pemerintahan daerah dan selanjutnya secara otomatis mempersiapkan laporan keuangan ketika laporan tersebut diperlukan.

Dari 30 unit computer dan laptop (17 unit computer dan 13 unit laptop) yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, hanya 10 unit dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan oleh faktor pegawai sebagai pengguna kurang layak maka computer sebagai perangkat pendukung teknis tidak diaktifkan, hal itu dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi permasalahan baru dalam sistem.

D. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan

Kabupaten Padang Lawas Utara

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang perhitungan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam satu tahun anggaran baik pada kelompok pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Pada laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara menyajikan rekening pendapatan, belanja, pembiayaan dan realisasinya. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 33.884.459.003,00 yang terdiri dari tiga pendapatan masing-masing Pendapatan Pajak sebesar Rp. 6.562.427.884,00.,

pendapatan retribusi sebesar Rp. 3.083.139.353,00., dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 24.238.891.766,00.

Pencapaian anggaran (target) tertinggi pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016, hal ini membuktikan pada tahun 2016 Padang Lawas Utara mendapatkan PAD lebih besar dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp. 15.705.985.955,84. Jenis pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp.481.455.045.996,00 karena realisasinya lebih besar dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp. 542.199.556.000,00. Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.179.907.948.350,00 dengan realisasinya Rp. 152.839.514.750,00.

Begitu juga dengan rekening belanja, jumlah belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 822.849.542.449,65 dengan realisasinya sebesar Rp. 761.974.221.809,00 sedangkan pembiayaan pada tabel Laporan Realisasi Anggaran dapat diketahui bahwa pembiayaan di sisi penerimaan dari anggaran sebesar Rp. 102.035.763.387,65 dengan realisasinya Rp. 102.035.763.887,65 yang berasal dari sisa lebih perhitungan realisasi tahun lalu sebesar Rp. 69.857.925.249,81 sedangkan dari sisi pengeluaran dianggarkan sebesar Rp. 2.913.340.270,00 terealisasi sebesar Rp. 2.405.249.525,00.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2016 telah menyajikan

laporan keuangan yang masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang masih berbasis kas dan belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang sudah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang disajikan sudah diaudit, meskipun Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian informasi laporan keuangan.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang, dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran 2016. Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun neraca dengan mengumpulkan, menganalisis, mencatat anggaran dan realisasinya ke dalam pos-pos neraca.

Pada tahun anggaran per 31 desember 2015 pada pos asset, jumlah asset lancar sebesar Rp. 142.814.102.020,69, jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp. 1.093.061.656,00, jumlah asset tetap sebesar Rp. 915.905.055.995,73 dan jumlah asset lainnya sebesar Rp. 9.832.811.996,00. Maka total asset pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 1.069.645.031.668,42. Pada pos kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 16.973.450.497,00, jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00, jumlah ekuitas Rp. 1.052.671.581.171,42. Maka total kewajiban dan dana ekuitas pemerintahan Kabupaten

Padang Lawas Utara pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.069.654.031.668,42.

Pada tahun anggaran 2016, pada pos asset, jumlah asset lancar sebesar Rp. 121.092.788.070,00, jumlah investasi jangka panjang sebesar Rp. 3.093.061.656,00, jumlah asset tetap sebesar Rp. 1.046.965.463.850,00. Dan jumlah asset lainnya sebesar Rp. 10.599.617.758,00. Maka total asset pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1.181.750.931.335,53. Pada pos kewajiban, jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 25.668.966.582,00, jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp. 0,00, jumlah ekuitas Rp. 1.156.081.964.753,53. Maka total kewajiban dan dana ekuitas Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp. 1.181.750.931.335,53.

Pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyajikan informasi aktiva, kewajiban, dan dana ekuitas pada akhir tahun anggaran 2016. Pemerintahan Kabupaten Padang lawas Utara telah mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar serta sudah mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban telah diklasifikasikan sesuai dengan waktu pembayarannya. Dana ekuitas telah disajikan dalam neraca yaitu dana ekuitas saja. Dimana dalam neraca yang disajikan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara membandingkan antara neraca tahun

berjalan dengan neraca tahun anggaran yang telah berlalu. Pos-pos pada neraca Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara belum menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi arus masuk dan arus keluarnya kas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun anggaran 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan kas oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara terdapat,

- Saldo Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
111.324.552.436,71
- Saldo Kas pada pemegang Kas yang
belum disetor s/d 31-12-2015 sebesar Rp. –
- Saldo Akhir Kas 2016 Rp.
111.324.552.436,00

Arus kas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aktivitas antara lain :

1. Aktivitas operasi

Merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional yang bersumber dari arus kas masuk pada tahun anggaran 2016 di luar pinjaman dan sisa lebih perhitungan anggaran yang lalu. Besarnya arus kas masuk dari aktivitas operasi selama tahun anggaran 2016 sebesar Rp.

1.049.552.061.025,26 dan dikeluarkan untuk membiayai aktivitas operasional sebesar Rp. 810.477.109.587,00 sehingga mendapatkan surplus operasional sebesar Rp. 239.074.951.438,26.

2. Aktivitas investasi

Menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto berkaitan dengan perolehan atau pelepasan sumber daya ekonomi yang ada, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada publik di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 230.440.427.691,00. Dari jumlah arus kas bersih tersebut pada tahun 2016 meningkatkan dari tahun sebelumnya karena di tahun 2015 jumlah arus kas bersih sebesar Rp. 170.639.985.692,00.

3. Aktivitas Transitoris

Menggambarkan jumlah arus kas masuk sebesar Rp. 65.491.862.053,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp. 65.489.209.176,00. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp. 2.653.337,00., pada tahun 2016 arus kas bersih dari aktivitas transitoris mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2015 jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp. 0,00.

Dari ketiga aktivitas dari laporan arus kas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

- Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi Rp. 239.074.951.438,00

- Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	Rp. 230.423.427.691,00
- Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris	<u>Rp. 2.653.377,00</u>
Kenaikan kas	Rp. 8.654.177.124,00

Laporan arus kas pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tetapi masih menggunakan PP Nomor 24 Tahun 2005 yang seharusnya sudah menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sebagaimana yang telah seperti teori-teori yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2016 juga menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan Pemerintahan Kabupaten padang Lawas Utara pada tahun anggaran 2016 belum berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi-informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti standar yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan.

Catatan atas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara telah disajikan secara sistematis sesuai PP No. 24

Tahun 2005. Catatan atas Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara meliputi penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintahan Padang Lawas Utara telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang berisi dasar penyusunan laporan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi penting lainnya, pengungkapan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan yang masih berbasis kas.

2. Analisis Peranan Pendukung Terhadap Keberhasilan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdapat kendala seiring dengan penerapannya. Kendala yang utama yang dihadapi Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penerapannya adalah sumber daya manusia dengan kualifikasi yang terbatas. Melihat perkembangan ilmu akuntansi pemerintahan di Negara kita Indonesia, sampai dengan saat ini masih sedikit sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintah dengan mengoperasikan sistem yang ada. Hal ini didorong oleh kurangnya kepedulian dan keinginan sumber daya manusia memahami tentang akuntansi pemerintahan dan

mampu menguasai tata cara mengoperasikan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai yang diharapkan.

Penempatan pegawai sumber daya manusia didalam menyajikan laporan keuangan daerah pemerintahan kabupaten Padang Lawas Utara masih ditemukan unsur nepotisme dan masih jarang dilandasi pendidikan dan kualifikasi pegawai tersebut. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara belum mampu menyajikan laporannya dalam tepat waktu dan sesuai yang diharapkan. Dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara masih menggunakan bantuan tenaga konsultan serta pendamping dari BPK. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya perubahan peraturan-peraturan pemerintah yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam mensosialisasikan secara maksimal pada pegawai atau sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Dalam menerapkan peraturan yang baru kurang dari 50% yang paham akan peraturan tersebut, sehingga dalam penyajiannya laporan keuangan sering mengalami keterlambatan. Karena tuntutan dan perubahan pemerintah yang selalu berubah akan membuat pemerintah daerah itu sendiri sedikit tersendat di dalam segi pembangunan maupun segi administrasi pemerintah.

Kendala kedua adalah perangkat pendukung. Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara telah mengeluarkan dana dengan angka yang cukup banyak untuk pembelian computer dan sistem akuntansi pemerintah

daerah. Namun dari beberapa penyajian laporan keuangan daerah baik setiap ada perubahan peraturan pemerintah daerah maupun sistem akuntansi pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan.

Hasil yang diharapkan dari pengguna Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan penggunaan computer sebenarnya adalah penghematan anggaran. Disisi lain, dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memenuhi tuntutan akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu prinsip perwujudan *good govermance* akan tercipta peningkatan kepercayaan pada pihak legislatife, dunia usaha, pebisnis, masyarakat, peningkatan kepercayaan dunia internasional, serta peningkatan kepercayaan kepada pemberian informasi yang handal kepada berbagai pihak akan paling bermanfaat dalam usaha peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pada saat ini, dukungan dan dorongan untuk mengembangkan akuntansi pemerintah daerah lebih pada pemenuhan tuntutan peraturan perundang-undangan, bukan karena kebutuhan akan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja sumber daya manusia yang ada. Namun pemerintah daerah juga masih harus mempertimbangkannya karena berhubungan dengan dana untuk pengembangan sumber daya manusia maupun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Hal ini akan mengganggu peningkatan dalam pemberian pelayanan yang maksimum bagi public sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah

daerah yang dihasilkan belum optimal. Disisi lain juga proses desentralisasi dan otonomi daerah yang masih belum dapat dijalankan sepenuhnya karena masih ada beberapa kewenangan yang belum terpisah secara jelas terutama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Padang Lawas Utara untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan pemimpin daerah agar stabilitas yang bagus, aman dan tentram dapat dicapai seperti perwujudan dari pemerintahan yang baik.

E. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun dengan langkah-langkah yang sedemikian agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.

Beberapa keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian, yaitu :

1. Keterbatasan wawasan penelitian yang masih kurang.
2. Keterbatasan tenaga, waktu dan dana penulis yang tidak mampu mencukupi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Penelitian hanya membatasi masalah hanya pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara, Tahun Anggaran yang di bahas hanya pada tahun 2016, serta dibatasi hanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4. Walaupun demikian, peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini. Segala kerja keras supaya peneliti lakukan serta bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada tahun anggaran 2016, Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara di dalam penyajian laporan keuangan daerah belum berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
2. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara masih menggunakan bantuan tenaga Konsultan dan pendampingan dari BPK. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia atau pegawai sebagai faktor pendukung pada keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan daerah yang masih rendah dalam menjalankan dan mengoperasikan aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah untuk menyajikan laporan keuangan sendiri. Salah satu penyebabnya adalah sering terjadinya perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah, sehingga membutuhkan waktu lama dalam memahami serta mensosialisasikannya kepada setiap pegawai yang terlibat di dalam penyajian laporan keuangan daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada tahun anggaran berikutnya hendaknya Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam penyajian laporan keuangan daerah telah berpedoman sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tidak lagi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 agar penyajian laporan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud seperti yang diharapkan.
2. Untuk tahun berikutnya hendaknya Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat menyajikan laporan keuangan daerah tepat waktu sesuai dengan kalender anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dan tidak terjadi lagi kesalahan.
3. Kualitas atau keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan lebih ditingkatkan dengan memberikan pelatihan teknis maupun nonteknis mengenai penyajian laporan keuangan yang baik, sehingga Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara mampu menyajikan laporan keuangan sendiri dengan program aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah tanpa harus menggunakan bantuan tenaga konsultan lagi dan setiap ada perubahan peraturan yang sumber daya manusianya dapat memahaminya dengan baik. Begitu juga dengan kualitas perangkat pendukungnya.

4. Pada tahun anggaran berikutnya, hendaknya kinerja Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara dapat lebih baik lagi dengan melakukan berbagai upaya untuk menjamin terpeliharanya kondisi yang baik, aman, dan kondusif sehingga tuntutan publik yang mengkehendaki transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bebas KKN dapat terwujud.
5. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara agar lebih mampu untuk menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku pada tahun anggaran berjalan, serta mengarahkan para pegawai agar lebih memahami Standar Akuntansi Pemerintah untuk mewujudkan laporan keuangan yang tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Siregar Ahmad Syaifuddin, Bendahara BPKPAD PALUTA, *Wawancara di Kantor BPKPAD PALUTA*, 24 Mei 2021 Pukul 10.12 WIB.

Anggota IKAPI. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Fokusmedia, 2011.

Amelia Putri dan Rike Lulut Dwi Ardilatri, “112420-ID-implementasi-standar-akuntansi-pemerinta.pdf,” t.t., dalam *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2014.

Ardy Wilther Sangian , “2836-ID-analisis-penerapan-akuntansi-berdasarkan-psap-pp-no24-tahun-2005-atas-penyusunan (1).pdf,” t.t., dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 4, Desember 2015.

Basri Hassan, dkk, “95109-ID-analisis-laporan-keuangan-dikaitkan-deng.pdf,” t.t., dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 1, Maret 2012.

Panggabean Fitri Yani, “KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN (1).pdf,” t.t., dalam *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, November 2019.

Hengki Permadi, dkk, “24818-Article Text-75992-1-10-20190108 (1).pdf,” t.t., dalam *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 8, No. 2, November 2016.

<https://sippp.ciptakarya.pu.go.id> > dokumen (diakses pada 25 mei 2021)

<https://id.wikipedia.org> > wiki > Kabupaten_Padang_La...(diakse pada 27 mei 2021)

<https://bpkpad.padanglawasutarakab.go.id/>

<https://bpkpad.padanglawasutara.go.id/kewajiban-wewenang>

<https://bpkpad.padanglawasutara.go.id/read/23/struktur-opd-bpkpad-padang-lawas-utara>

Kaswan. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Kema Ihwan, “1696-ID-penyajian-laporan-keuangan-daerah-berdasarkan-standar-akuntansi-pemerintahan-pad.pdf,” t.t., dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, September 2013.

Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bogor: Halim, 2007.

Kurniawan M. Manangkalangi, “1622-ID-analisis-penyajianlaporan-keuangan-daerah-provinsi-sulawesi-utara (1).pdf,” t.t., dalam *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 3, September 2013.

“DOCRPIJM_1492568851Bab_2_rev00.pdf,” t.t.

Muindro Renyowijoyo. *akuntansi sektor publik*. jakarta: mitra wacana media, 2013.

Nurlan Darise. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, t.t.

———. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Blu*. Jakarta: Indeks, 2009.

Nurmalia Hasanah dan Achmad Fauzi. *Akuntansi Pemerintah*. Bogor: In Media, 2017.

Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*. Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015.

Silka Hartina. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

www.bpk.go.id/ihps

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Irna Marlina Siregar
2. Nama Panggilan : Irna
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Purba Sinomba, 26 Juni 1999
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Anak ke : 5 (lima) dari 5 (lima) Bersaudara
7. Alamat : Purba Sinomba
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/ HP : 082271455074 (irnaasiregar8@gmail.com)

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Nama Ayah : Palitan Siregar
2. Pekerjaan : Petani
3. Nama Ibu : Tiamala Harahap
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2011 : SDN 101130 Purba Sinomba
2. Tahun 2011-2014 : SMP N 3 Padang Bolak
3. Tahun 2014-2017 : SMA N 1 Padang Bolak
4. Tahun 2017-2021 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Lampiran I

Foto Dokumentasi



**Foto Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara**

Lampiran II



**Foto Dengan Bapak Bendahara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pendapatan Daerah
Padang Lawas Utara**

Lampiran III



**Foto Bersama Bapak Sekretaris dan Pengurus Laporan Keuangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Padang Lawas Utara**

Lampiran IV



Foto Peneliti

**Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Padang Lawas Utara**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1789 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/09/2020
Lampiran :
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

04 September 2020

Yth. Bapak/Ibu;

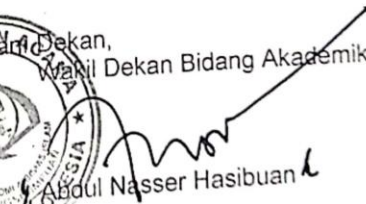
- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Nofinawati | : Pembimbing I |
| 2. Ali Hardana | : Pembimbing II |

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Irna Marlina Siregar
NIM	: 1740200271
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: Analisis Penyajian laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 760/In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2021
Hal : Mohon Izin Riset

31 Maret 2021

Yth. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan PAD Daerah PALUTA

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Irna Marlina Siregar
NIM : 1740200271
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JL. GUNUNGTUA – PADANGSIDEMPUAN KM.3 TELP/FAX (0635) 510825
GUNUNGTUA

KODE POS 22753

Gunungtua, 27 April 2021

Nomor : 800 / 719 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam IAIN
Padangsidimpuan
di-

Tempat

Sehubungan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Padangsidimpuan Nomor : 768/In.14/G.1/G.4c/TL.00/03/2021 tanggal 31 Maret
2021 tentang permohonan izin riset di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah.

NAMA : IRNA MARLINA SIREGAR
NIM : 1740200271

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami tidak merasa keberatan yang
namanya tersebut untuk melaksanakan riset di kantor kami.

Demikian disampaikan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**



TUAN RAHMAT HASIBUAN, S. STP, MM
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 40830427-200112 1 003

Tembusan :

1. Bupati Padang Lawas Utara (sebagai laporan),
2. Inspektorat,
3. Peringgal,